

**BAHASA POLITIK DALAM TINJAUAN FILSAFAT ANALITIK: MENIMBANG
PEMIKIRAN WERNER HOLLY**

Oleh

Tubagus Damanhuri¹, Rafi'i², Gede Agus Siswadi³
Universitas Gadjah Mada^{1,3}, Universitas Sahid²
e-mail: tubagusdamanhuri@mail.ugm.ac.id¹, rafii@usahid.ac.id²,
gede.agus.siswadi@mail.ugm.ac.id³

ABSTRACT

This paper aims to examine the political language in Werner Holly's thought which is then reviewed from analytic philosophy. The material object in this discussion is the political language of Werner Holly's perspective. The formal object is the analytical philosophy of language. This article uses qualitative/library research methods with elements of interpretation, internal coherence, and description methods. The results of the discussion found that: First, political language loses its credibility due to politicians' bad reputation regarding their political behaviour, which is largely caused by the way they use language. Second, the vote of no confidence against politicians refers more to the lack of openness in the way they act verbally. That lack of openness is often seen as 'obfuscating' or 'manipulating' which makes a difference between what is said and what is meant. Thirdly, there is an almost universal principle in political language. That any utterance must be formulated, any expression must be chosen in such a way as to serve the purpose of propaganda. Fourth, it follows that almost all political language in the public arena has two layers of meaning that cannot suffice with a single level of interpretation. Unlike everyday language, political language has its own special character. Finally, an examination of the discussion of "Credibility and political language" in Werner Holly's paper focuses more on the pragmatic approach to language. In Austin's perspective, it is found that political language is closely related to the flow of pragmatics and speech acts that connect language with context.

Keywords: *language, politics, werner holly, analytic philosophy*

I. PENDAHULUAN

Ruth Wodak, salah seorang ahli bahasa Austria, menulis buku (sebagai editor) yang berjudul "*Language, Politic, and Ideology: Studies in Political Discourse*" pada tahun 1989. Buku tersebut merupakan kumpulan makalah dari berbagai ahli bahasa yang mencoba mencakup aspek-aspek

linguistik kritis ke dalam tiga bagian: (1) *Language and totalitarianism*; (2) *Language of politics/or politicians*; dan (3) *Institutions, control, and discourse in specific settings*.

Dalam pengantar buku tersebut, Ruth Wodak mengomentari relasi bahasa dan kekuasaan. Menurutnya, para

penulis dalam buku ini, sebagaimana dirinya, merasa prihatin dengan praktik sosial perilaku bahasa, dengan dialektika antara masyarakat (termasuk sub-sistemnya), kekuasaan, nilai-nilai, ideologi, pendapat yang diungkapkan dan dibentuk dalam berbahasa.

Dari hal tersebut, menurut Wodak, hadirnya analisis kritis tidak boleh tetap deskriptif dan netral. Sebagaimana Habermas (1971), bahwa suatu analisis kritis harus dipandu kepentingan tujuan untuk mengungkap ketidakadilan, ketidaksetaraan, *taking sides with the powerless and suppressed*. Namun, ini tidak berarti bahwa suatu penelitian harus sepihak, bukan "ilmiah". Juga sebagaimana Adorno (1969) yang mengamini bahwa tidak ada penelitian yang sepenuhnya objektif, *"the interests, values and decisions of the researcher always guide the analysis."* Oleh karena itu, penting untuk menyatakan nilai-nilai ini secara eksplisit, untuk menganalisis semua aspek, memperhitungkan banyak data dan metode sebelum menarik kesimpulan atau sebelum mulai menafsirkan atau menjelaskan. Wodak (1985; 1986) menekankan suatu hal yang patut diperhatikan adalah: *"diagnosis 'first', interpretation and 'therapy' to follow!"*

Wodak mencermati bahwa fungsi dan status bahasa sering kali diabaikan dalam relevansi sosial. Padahal, perubahan bahasa selalu memanifestasikan perubahan sosial; perubahan bahasa (atau perubahan perilaku bahasa) juga dapat memicu perubahan sosial. Wodak (1986) menegaskan, *"language only*

gains power in the hands of powerful; language is not powerful "per se." Maka dari itu diperlukan adanya suatu linguistik kritis, yang menurut Wodak bertujuan untuk diagnosis bahasa dan relasi kuasa menjadi transparan. Wodak (1986) menyatakan, *"What are the aims of critical linguistics? Generally speaking, we want to uncover and de-mystify certain social process in this and other societies, to make mechanisms of manipulation, discrimination, demagoguery, and propaganda explicit and transparent."*

Namun dalam tulisan ini, penulis akan menelaah lebih lanjut pada bagian kedua dari buku tersebut dalam topik pembahasan *"Credibility and political language"*. Makalah tersebut ditulis oleh Werner Holly yang mencoba melihat mekanisme persuasi, strategi yang digunakan oleh politisi ketika mereka berusaha tampil dan terdengar "kredibel". Werner mampu menunjukkan beberapa kontradiksi yang sangat penting antara "apa yang dikatakan" dan "apa yang dimaksud" dalam bahasa politik. Dan dari makalah Werner tersebut, penulis mencoba menelaah dalam tinjauan filsafat analitik.

II. PEMBAHASAN

2.1 Kredibilitas (Bahasa) Politisi

Werner menjelaskan bahwa seorang politisi sering kali dikenal sebagai personifikasi yang tidak memiliki kredibilitas. Pernyataan tersebut sebagaimana '*Principe*' Macchiavelli yang menjelaskan bahwa prototipe politisi jahat modern tidak lagi memiliki keraguan diri untuk menjadi

munafik. Hal itu dapat terlihat ketika kata “politik” menjadi identik dengan berpura-pura atau *disembling*, sebagaimana penulis Jerman Friedrich von Logau (1604-1655), menyebutkan bahwa politisi adalah orang yang tahu bagaimana “*to be different, to seem different*”, “*to speak differently, to mean differently*.” Werner menegaskan bahwa reputasi buruk politisi mengenai perilaku politik mereka sebagian besar disebabkan oleh cara mereka menggunakan bahasa.

Maka menjadi penting untuk membedakan antara “mengatakan sesuatu yang salah” dan “berbohong.” Lalu, apa artinya mempercayai apa yang dikatakan seseorang? Tidak lain, adalah dengan kita tidak menganggap orang itu pembohong. Pembohong adalah orang yang menegaskan sesuatu dan tidak mempercayainya sendiri. Jadi kita harus mengetahui pikiran seseorang untuk menilai dia pembohong. Dengan melihat dari definisi klasik Agustinus-kriterianya adalah ‘kemauan untuk menyatakan sesuatu yang salah’ (*voluntas falsum enuntiandi*). Itulah sebabnya kita harus membedakan ‘*credibility*’ atau ‘*authenticity*’ proposisi di satu sisi, dan “*trustworthiness*” di sisi lain.

Mosi tidak percaya terhadap politisi lebih mengacu pada kurangnya keterbukaan dalam cara mereka bertindak secara verbal. Kurangnya keterbukaan itu sering dilihat sebagai ‘mengaburkan’ atau ‘memanipulasi’ yang membuat adanya perbedaan antara apa yang dikatakan dan apa yang dimaksud (kasus ekspresi non-

literal). Bahkan ekspresi non-literal tidaklah cukup sebagai kriteria untuk “ketidakpercayaan”; jika tidak, kita tidak dapat menganggap berbicara retorik atau metaforis sebagai sesuatu yang kredibel. Oleh karena itu, kurangnya kepercayaan terhadap para politisi bukan karena fakta bahwa ucapan mereka tampaknya salah atau terlalu tidak langsung. Alasan utamanya bahwa dalam bahasa politik, cara menyampaikan makna dikaburkan, dan yang terpenting, niat pembicara tidak terbuka/terselubung.

2.2 Teori “*Intentions*” Paul Grice dan Masalah Keterbukaan

Dalam menganalisis keterselubungan bahasa politik tersebut, Werner meminjam Teori “*intentions*” Paul Grice. Grice mengembangkan model komunikasi yang dimulai dari asumsi “*that any action has a purpose, i.e. an intended effect, in the case of communication a reaction r from the addressee.*” Mengenai konstruksi teori Grice tersebut, Werner menilai, “*the crucial point of Grice’s construction for our subject seems to be that this effect should not be generated through some causal or conventional mechanism, but through the addressee’s recognition of the addresser’s intention to induce this effect.*” Secara lebih jelas kita bisa melihat rumusan tiga kondisi Teori Grice:

- (1) *S intends that H shows r.*
- (2) *S intends that H recognizes that (1).*
- (3) *S intends that H shows r on the basis of his recognition of (1).*

Akan tetapi di sisi lain, menurut Werner, penjelasan Grice yang diupayakannya untuk menemukan gagasan makna itu justru lebih cocok sebagai dasar untuk penjelasan tentang apa artinya 'berkomunikasi'. Alasannya, bagi Werner, mungkin saja teori Grice tersebut berguna untuk menjelaskan konsep 'tindakan simbolis atau verbal', dan 'makna', yang sering muncul dalam konteks 'komunikasi', tetapi 'tindakan simbolis atau verbal' tidaklah identik dengan konsep komunikasi Grice. Sebab, sangat mungkin untuk bertindak secara verbal tanpa memenuhi syarat (2) dan (3) tersebut dalam pikiran ketika kita berbicara mengenai tentang 'makna terselubung' atau 'menipu'.

Werner menyoroti diperlukan telaah lebih jauh mengenai konsep 'komunikasi'. Dalam akar bahasa Latin, kata "komunikasi" memiliki arti "membuat sesuatu menjadi umum, yakni diketahui bersama. Oleh karena itu, jika seorang pembicara menyembunyikan niatnya tentang efek yang ingin dia sertakan, ini dianggap setidaknya sebagai penyimpangan dari norma. Bahkan, sebagian besar teori filosofis dan linguistik memberikan definisi "*language as a means of mutual understanding*." Pandangan bahwa bahasa harus mengungkapkan dan tidak menyembunyikan pikiran itu telah dipertahankan sejak zaman Augustin.

Pemosisian bahasa yang terkesan 'moralistik' tersebut kontras dengan pandangan realistis/skeptis yang mendasarkan keyakinan bahwa:

"*Sermo hominum mores et celat et indicat idem*." Di sisi lain, Humboldt menjelaskan bahwa "*the idea of language as 'energeia' (activity), tending towards a reciprocal or social construction of meaning, has become prominent part of linguistic theory*." Oleh karena itu sangat diperlukan bahwa konsep bahasa sebagai 'instrumen manipulasi' didukung oleh model yang menjelaskan bagaimana pemahaman dapat dikelola tanpa timbal balik yang utuh.

Pertanyaan selanjutnya, apa yang mungkin digunakan seseorang dengan tujuan menyampaikan makna (kompleks) dari suatu ucapan? *Pertama-tama*, ia dapat menggunakan apa yang disebut makna ekspresi yang biasa atau leksikal. Contoh kasus yang sangat sederhana: seseorang berarti sesuatu (panas') dan menyampaikannya secara eksplisit dengan mengatakan: "*Ini panas*". Masih ada masalah ketidakjelasan dan ambiguitas, ('suhu tinggi'/'pedas/baru/bergairah' dll.), ditemukan di hampir setiap makna atau dalam banyak konstruksi sintaksis. *Kedua*, pembicara dapat menyampaikan makna dengan menggunakan apa yang telah digambarkan sebagai praanggapan dan implikasi semantik. Contoh: bahwa sebuah ruangan sangat panas dapat diungkapkan secara ironis dengan mengatakan: "*itu sangat dingin*."

Oleh karena itu, Grice (1975) mengajukan suatu konsep mekanisme 'implikatur percakapan' yang menjelaskan bahwa untuk mencapai pemahaman yang benar tentang suatu ucapan, seorang pendengar

berasumsi bahwa pembicara tidak melanggar prinsip kerja sama yang umum, atau beberapa prinsip kerja sama yang lebih spesifik. Penulis melihat bahwa "implikatur percakapan" ini merupakan konsep penting Grice yang dapat menjadi petunjuk proses interpretasi makna yang berdasarkan situasi dan konteks.

Dengan demikian, Werner mengambil kesimpulan bahwa makna yang dimaksudkan harus menyimpang dari versi literal, karena jika tidak, pembicara akan melanggar prinsip-prinsip ini dan dengan demikian tidak bekerja sama sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep 'implikatur percakapan' oleh Grice di atas. Werner mencoba memformulasikan bahwa ucapan sebagai tindakan/makna-kompleks dapat terdiri dari beberapa pola yang disampaikan oleh perangkat makna yang berbeda:

- (1) *Literal meaning components,*
- (2) *Semantics, and*
- (3) *Pragmatic presupposition or implications*

Penerima harus memilih komponen makna yang relevan dari berbagai kemungkinan, sesuai dengan keadaan tertentu dari interaksi. Untuk menangani tugas ini, penerima mungkin mempertanyakan apa yang mungkin dimaksudkan oleh pembicara, tetapi ini hanya bagian dari proses interpretatif. Tujuan umumnya adalah untuk sampai pada penafsiran yang masuk akal, yaitu yang sesuai dengan seluruh konteks.

Werner menyadari bahwa sebenarnya model komunikasi

yang ditawarkan Grice lebih berurusan dengan 'konvensi' (prinsip kerja sama) sebagai alternatif dari 'niat', dan dengan pentingnya mereka dalam memahami makna sebuah ucapan. Tetapi bagi Werner, 'konvensi' versus 'niat' tampaknya menjadi dikotomi yang salah. *Pertama*, tidak mungkin mengenali suatu niat tanpa menggunakan semacam makna konvensional. Konvensi tidak hanya penting untuk makna ekspresi "literal" yang biasa. Praanggapan dan implikasi semantik dan bahkan pragmatis juga diatur oleh aturan, meskipun ini adalah konvensi dari jenis yang berbeda. Kedua, menggunakan konvensi tidak mengecualikan relevansi niat. Kadang-kadang, niat tertentu, yang sesuai dengan seluruh pengertian tindakan verbal, memberikan indikasi untuk interpretasi ucapan (Ex: "I do" during a wedding).

Hal lain yang perlu dipahami bahwa masalah keterbukaan makna pertama-tama merupakan masalah pemahaman. Mengenai hal ini, Werner mempertanyakan "apakah seorang pembicara membuat terang-terangan apa yang dia inginkan?" Jawabannya adalah iya, jika dia memenuhi kondisi kedua Grice. Meskipun arti dari sebuah ucapan mungkin cukup jelas, tetapi masih belum jelas apakah pembicara ingin mengungkapkan niatnya. Dalam hal ini, tidak akan ada kesulitan dalam memahami, tetapi akan ada kesulitan membuat pembicara bertanggung jawab atas semua komponen makna dari ucapannya. Tetapi sangat sulit untuk membuat pembicara bertanggung

jawab atas apa yang sebenarnya dia maksud, karena niat begitu sering menolak bukti. Meskipun keterbukaan makna harus dibedakan dari keterbukaan niat, ada hubungan antara keduanya. Sulit untuk menyangkal niat yang berhubungan langsung dengan makna yang disampaikan secara terang-terangan. Contoh: janji eksplisit.

Meskipun terang-terangan makna dan keterbukaan niat itu terhubung, akan tetapi “keterbukaan niat” harus diperlakukan secara terpisah karena terkait dengan pertanyaan tentang tanggung jawab. Ada ujaran-ujaran politik yang tidak cukup bisa dipahami, terutama bagi masyarakat luas. Tetapi sebagian besar kasus yang bermasalah tidak berkaitan dengan kejelasan, tetapi dengan pertanyaan “apakah pembicara dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan dampak dari ucapannya.” Masalah yang tampak adalah: tanggung jawab untuk tindakan verbal menyimpang secara signifikan dari tanggung jawab atas efek tindakan non-simbolis. Pertama-tama, ini bukan hubungan sebab akibat yang menghubungkan tindakan verbal dan efek pada bagian dari pendengar. Jika seorang pembicara mengucapkan sesuatu kepada pendengar dan ini berkenaan tentang sikap, emosi, atau tindakan yang diharapkan dari pihak pendengar (efek perlokusi), maka efek ini bukan karena mekanisme kausal otomatis, tetapi karena pendengar memenuhi tujuan pembicara.

Menurut Werner, jika konvensi saja tidak cukup kuat untuk menetapkan tanggung

jawab atas tindakan ilokusi, maka satu-satunya cara untuk melakukan ini adalah dengan meminta pembicara mengungkapkan niatnya. Ini dilakukan oleh pembicara yang secara sukarela mengambil tanggung jawab untuk kinerja tindak tutur tertentu. Jadi kondisi Grice (2) dan (3) terkait erat dengan tanggung jawab, yaitu penentuan makna yang tetap, tetapi tidak ada hubungannya dengan pertanyaan tentang bagaimana menyampaikan makna tertentu. Maka tidak diragukan lagi, konvensi mungkin cukup kuat untuk mengarah pada pemahaman, tetapi tidak cukup kuat untuk menjadi alat bukti untuk pemahaman itu. Bias ini secara sistematis digunakan oleh politisi dan orang-orang lain yang berkepentingan dengan pengaruh tersebut (Werner, 1986).

2.3 Dua Cara “*Non-Communicating*”

Werner menilai bahwa kredibilitas seorang politisi berkaitan dengan cara mereka mengambil atau menolak tanggung jawab atas komponen makna yang dimaksudkan dan disampaikan, seperti ada banyak kasus dalam politik di mana ucapan kontroversial ditafsirkan, dikoreksi atau diimunitasi setelah fakta. Kita dapat berargumen bahwa si pembicara memiliki kepentingan sesuai dengan interpretasi kita, tetapi tidak ada kepastian akhir bahwa si pembicara itu tulus atau menipu kita. Maka akan menjadi sulit, jika dampaknya tidak terlihat terhadap publik.

Sebagian besar ucapan politik adalah fenomena satu arah. Niat si pembicara hanya dapat disimpulkan dari pengetahuan

umum kita tentang kepentingan, tujuan kelompok/partai dan sosok politisi tersebut. Werner menguraikan bahwa ada juga kasus yang memungkinkan beberapa proses menyembunyikan niat untuk diungkapkan, yaitu dengan dua jalan/cara:

Pertama, ada teknik *"the running-board"*. Werner menjelaskan bahwa yang dimaksud teknik *"running-board"* adalah *"the interesting part of the meaning complex gets to its destination but isn't allowed to sit in the car. It also could be compared with a stowaway, alongside the official passengers."*

Werner menemukan adanya prinsip yang hampir universal dalam bahasa politik. Bahwa setiap ucapan harus dirumuskan, ekspresi apa pun harus dipilih sedemikian rupa untuk tujuan propaganda. Keuntungan dari metode penyembunyian ini adalah pengurangan kontrol rasional atas apa yang telah disampaikan dan jika ada suatu kegagalan yang terjadi di depan akan dapat dianulir pembelaan. Oleh karena itu hampir semua bahasa politik di arena publik memiliki dua lapisan makna yang tidak bisa cukup dengan satu tingkat interpretasi saja. Memang, dalam bahasa sehari-hari hal ini pun kerap terjadi, tapi bagi Werner bahasa politik memiliki karakter khusus sendiri.

Metode 'non-komunikasi' pada teknik *the running-board* ini menyampaikan pola (propaganda) secara diam-diam dengan tanpa dikomunikasikan, sehingga menurut Werner hal ini yang menjadi alasan utama kesan

intuitif bahwa politisi tidak terlalu dapat dipercaya. Konsekuensinya adalah ketidakpercayaan umum/publik terhadap penggunaan bahasa politik dalam realitas politik.

Kedua, teknik *the phantom-meaning*. Werner menjelaskan bahwa, *"this technique is used systematically by politicians when needs, expectations, and hopes are activated for propaganda purposes without clear-cut commitments on the part of the politicians."*

Teknik *"the phantom-meaning"* mengandung komponen makna dasar yang digunakan sebagai kepura-puraan, yaitu tidak dimaksudkan sama sekali. Teknik ini lebih rentan untuk dinilai sebagai penipuan. Kesan ketidakpercayaan pada si pembicara (politisi) akan lebih tampak dan lebih langsung. Werner menjadikan Pidato Reagan kepada kaum muda Jerman saat itu sebagai contoh yang sangat baik dalam teknik ini, sebab pidatonya penuh dengan janji-janji samar yang diberikan dalam gaya yang hampir religius, dan sebagainya.

Varian dari teknik ini beroperasi dengan inversi. Bukan literal, tetapi makna 'non-literal' berfungsi sebagai pembenaran. Pernyataan berlebihan dan generalisasi dilakukan dengan mengacu pada konteksnya. Dalam bahasa sehari-hari, hal ini terlihat sebagai cara yang biasa untuk menentukan makna, akan tetapi, menurut Werner, dalam konteks politik akan berdampak interpretasi yang terlalu jauh jangkauannya. Contoh dalam pidato Reagan:

"Understand that there are no limits to how high each of you can climb. Unlike your cousins on the other side of the wall, your future is in your hands- you are free to follow your dreams to the stars.... My young friends, you cannot only control your lives, remember that in your hearts are the stars of your fate; remember that everything depends on you."

Mengenai pidato Reagan tersebut Werner berkomentar, *"obviously Reagan risks or even intends that certain generalizations are understood literally, in the knowledge that he has resource to the fact that, in this case, the right understanding must be non-literal. In doing this, he evades the responsibility of having raised exaggerated hopes."*

2.4 Kondisi Penggunaan Bahasa Politik

Sejauh ini, Werner berpendapat bahwa kurangnya kepercayaan terhadap bahasa politik, bahkan disesalkan oleh politisi itu sendiri, adalah karena cara mereka untuk 'tidak berkomunikasi' -sebagaimana dalam dua teknik utama *"non-communication"* dengan menyembunyikan niat dan makna terselubung - yang justru menodai penggunaan bahasa mereka.

Politisi sering kali menggunakan bahasa dengan cara tertentu sehingga ada semacam retorika berlebihan, yang menurut Werner, cara 'non-komunikasi' tersebut menjadi suatu candu yang sulit dilepaskan oleh mereka. Karenanya,

propaganda menjadi pola utama bahasa politik yang *"suggest the inconspicuous handling of intentions."* Mengenai persoalan propaganda, Werner menjelaskan:

"Propoganda, by definition, is directed towards success as opposed to agreement or mutual understanding —to use Habermas (1981) distinction. It is true that Grician communicator also aims success, just as the 'non-communicator' also needs to be understood. The point is that the speaker's interests may be pursued regardless of the hearer's interests in the case of 'non-communication', whereas both have to be coordinated and brought to a consensus in the case of Grician communication."

Dengan demikian, menurut Werner, seorang politisi akan memandang *'clear rational concensus'* dalam penggunaan bahasa politik di dalam publik tidak mungkin terjadi karena terlalu heterogen. Mereka akan mempertahankan bahwa *'political language'* dengan demikian harus kabur dan multi-level, karena tidak mungkin menjangkau 'konsensus rasional' (sesuatu yang disepakati bersama secara rasional) dari seluruh kelompok. Adanya kepentingan kelompok dalam politik memungkinkan hadirnya *'linguistic vagueness and veiling'* yang justru hal tersebut pada gilirannya akan mengorbankan kepercayaan dan kredibilitas bahasa politik.

2.5 Analisis Pragmatik dalam Bahasa Politik

Sebenarnya, bahasan mengenai “kredibilitas dan bahasa politik” yang telah Werner jelaskan lebih menitikberatkan pendekatan pragmatik bahasa. Pragmatik mempertimbangkan penutur dan kegiatan kebahasaan, tidak hanya ungkapan dan penunjukannya. Sehingga bukan hanya bahasa politik yang harus kontekstual, sebab di mana pun penggunaan bahasa mesti kontekstual dengan melihat situasi dan kondisi yang aktual dan faktual.

Secara lebih jelas, jika menelaah dalam perspektif Austin, maka kita temukan bahwa bahasa politik erat kaitannya dengan aliran pragmatik dan tindak tutur yang menghubungkan bahasa dengan konteks. Bahwa kita tidak hanya memaknai bahasa secara harfiah, namun juga memperhatikan penggunaan bahasa yang dipakai dalam konteks kehidupan sehari-hari (*ordinary language*).

Mengenai hal tersebut, J.L. Austin (1962) telah menjelaskan teori tindak tutur/ *speech act* sebagai “*People do things with words and something is to do something*”. Menurutny, tindak tutur dapat dianalisa dalam tiga level, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Pertama, lokusi (*locutionary act*) adalah tindak tutur yang berfungsi untuk mendeskripsikan sesuatu hanya dengan sebuah pernyataan saja. Contoh: “*kucing mempunyai empat kaki*”. Kalimat tersebut bersifat konstatif, yaitu hanya sebagai pernyataan. Kedua, ilokusi/ (*ilucotionary force*) merupakan tindak tutur yang menekankan ilmu pragmatik yang

menghasilkan tindakan dari sebuah pernyataan. Contoh: saya berjanji untuk diet. Kalimat tersebut bersifat pragmatik atau performatif. Ketiga, perlokusi (*perlocutionary effect*) merupakan tindak tutur yang menghasilkan efek-efek yang dihadirkan ketika penutur mengatakan/membicarakan sesuatu. Pernyataan perlokusi menghendaki kepekaan bagi penerima untuk tindakan-tindakan yang dikehendaki dari penutur.

Dalam bahasa politik, ilokusi tampak pada pernyataan-pernyataan/ pidato politisi yang telah dibahas Werner sebagai tindak tutur yang dalam penerimaan masyarakat umum lebih kepada tanggung jawab atas aktualisasi dari pernyataan-pernyataan yang telah mereka buat, alih-alih seharusnya melihat sebagai pernyataan-pernyataan kosong saja.

Sementara ilokusi dalam bahasa politik yang Werner jelaskan lebih kepada desakan bagi para politisi untuk mengungkapkan secara terbuka perihal niat dibaliknya. Sehingga permasalahan “niat/maksud” menjadi pembahasan yang cukup diperhatikan Werner melalui penjelasan teori “implikatur percakapan” dari Paul Grice perihal masalah keterbukaan niat. Grice (1975) mengajukan suatu konsep mekanisme ‘implikatur percakapan’ yang menjelaskan bahwa untuk mencapai pemahaman yang benar tentang suatu ucapan, seorang pendengar berasumsi bahwa pembicara tidak melanggar prinsip kerja sama yang umum, atau beberapa prinsip kerja sama yang lebih

spesifik atau setidaknya para politisi mesti melihat suatu “bahasa yang disepakati” dalam kesadaran bahasa politik yang digunakannya. Sementara bahasa politik yang ada cenderung mengaburkan hal tersebut dengan hadirnya propaganda-propaganda yang dibuat para politisi untuk menyembunyikan niat dari pernyataan dan juga tindakan politisnya.

Dalam aspek perlokusi, para politisi cenderung menghendaki agar para penerima terpengaruh dan mengikuti kepentingan politiknya dalam pelbagai perhelatan/kontestasi pemenangan di ranah publik. Sementara yang menjadi kritik bagi Werner kepada para politisi tersebut (seharusnya) lebih kepada ketidakefektifan mereka dalam penggunaan bahasa, bukan pada aspek politik praktisnya. Sehingga bahasa politik memang dinilai memiliki lapisan kedua yang menghendaki para penerima untuk lebih “jeli” memahami bahasa-bahasa politik yang ada. Permasalahan demikianlah yang kemudian membuat publik atau dalam hal ini masyarakat menilai bahasa politik secara negatif dan menghakimi para politisi bahwa mereka tidak memiliki kredibilitas dalam pernyataan-pernyataannya.

III. SIMPULAN

Dari *review* bahasan mengenai bahasa politik dalam tinjauan filsafat analitik di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa bahasa politik erat kaitannya sebagai bahasa pragmatik. Pragmatik mempertimbangkan penutur dan kegiatan kebahasaan, tidak hanya ungkapan dan penunjukannya.

Sehingga bukan hanya bahasa politik yang harus kontekstual, sebab di mana pun penggunaan bahasa mesti kontekstual dengan melihat situasi dan kondisi yang aktual dan faktual. Hal yang menjadi kritik bagi para politisi adalah perihal caranya menggunakan/menuturkan bahasa di ranah publik. Bahasa politik sebenarnya sama saja dengan bahasa sehari-hari yang membutuhkan kontekstualisasi agar menghindari bias pernyataan dan tindakan yang kekinian dinilai sinis oleh publik. Oleh karena itu, para politisi harus belajar mengenai analitika bahasa dengan memperhatikan kaidah-kaidah tindak tutur demi kredibilitas pernyataan-pernyataannya dalam bahasa politik di ranah publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adorno, T.W. 1969. *Der postivismusstreit in der deutschen Soziologie*. Berlin-Neuwied: Luchterhand.
- Austin, John L. 1962. *How to Do Things with Words*. Oxford: University Press.
- Bakker, Anton dan Charris Zubair, Achmad. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Grice, Herbert P. 1975. *Logic and Conversation*. In *Syntax and Semantics*. Vol. 3. Ed. Peter Cole and J.L Morgan. New York: Academic Press.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Habermas, Jurgen. 1981. *Theorie des kommunikativen Handelns*. 2 Volumes. Frankfurt: Suhrkamp. English

translations: Habermas, J. 1984. *The Theory of Communicative Action*. Volume 1: *Reason and the Rationalization of Society*. Boston: Beacon Press; Habermas, J. 1987. *The Theory of Communicative Action*. Volume 2: *System and Lifeworld: A Critique of Functionalist Reason*. Boston: Beacon Press.

Wodak, Ruth, ed. 1989. *Language, Power, and Ideology: Studies in Political Discourse*. In "Credibility and Political Language" by Werner Holly. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.